

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai unit kerja tingkat eselon II wajib menyusun Laporan Kinerja. Laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai media evaluasi untuk melihat efisiensi dan efektifitas pencapaian sasaran dari program dan kegiatan yang bermuara pada pencapaian visi dan misi Badan POM. Dari hasil evaluasi dapat dilihat prioritas kegiatan yang harus diutamakan dalam perencanaan-perencanaan selanjutnya, dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya dan sumber dana dibandingkan dengan tuntutan lingkungan strategis yang semakin berkembang.

Pada Laporan Kinerja Tahun 2016 ini, Biro Perencanaan dan Keuangan telah mengukur capaian kinerja sasaran strategis sesuai Renstra 2015-2019. Pencapaian indikator kinerja 2 sasaran kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan memperoleh kriteria BAIK karena 100% dari target yang ditetapkan berhasil dicapai. Kedua sasaran kegiatan tersebut adalah : 1) Dihasilkannya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan dan hasil evaluasi yang terintegrasi; dan 2) Tersusunnya kajian organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi. Indikator kedua sasaran tersebut juga adalah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Perencanaan dan Keuangan. Pencapaian kedua sasaran kegiatan tersebut dibahas secara lebih detil pada BAB III Laporan ini.

Pada Laporan Kinerja 2016, kami juga membahas pencapaian sasaran strategis Biro Perencanaan dan Keuangan yang pencapaiannya pada kriteria KURANG, yaitu Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM. Hal ini disebabkan karena dari 3 indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis, terdapat 1 indikator yang pencapaiannya pada kriteria KURANG yaitu Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai SAKIP A. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat pada tahun 2016, belum ada unit kerja yang berhasil mencapai nilai SAKIP A sementara target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah 6 unit kerja. Walaupun demikian terjadi peningkatan nilai SAKIP di semua unit kerja BPOM dibandingkan dengan tahun lalu, dimana tidak terdapat lagi unit kerja dengan predikat CC. Untuk 2 indikator sasaran strategis lain, yaitu Jumlah satuan kerja dengan laporan keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Jumlah unit kerja yang menerapkan ISO 9001:2008 secara konsisten, berhasil mencapai 100% target yang ditetapkan sehingga berada pada kriteria BAIK.

Pada BAB III dilaporkan dari 78 sub kegiatan yang terlaksana di Biro Perencanaan dan Keuangan dari tahun 2016 terdapat 1 sub kegiatan yang terhitung tidak efisien. Sebagai catatan untuk pelaksanaan kegiatan di tahun-tahun mendatang, maka Biro Perencanaan dan Keuangan akan berupaya untuk mempertahankan kinerja yang sudah tercapai dengan baik dan terus melakukan upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk peningkatan kinerja kegiatan yang belum memuaskan.